



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## URGENSI PEMETAAN HAMBATAN TARIF DAN NON-TARIF DI BEBERAPA NEGARA BRICS

**Rasbin**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[rasbin@dpr.go.id](mailto:rasbin@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemetaan hambatan tarif dan non-tarif secara komprehensif menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia dalam upayanya menembus pasar negara-negara BRICS. Kelompok ini, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (serta anggota baru seperti Uni Emirat Arab dan Iran, termasuk Indonesia), menawarkan potensi besar dengan kontribusi terhadap 37,82% PDB global dan hampir separuh populasi dunia (yakni 48,1%). Namun, di balik potensi itu, terbentang tantangan serius dalam bentuk hambatan teknis dan administratif yang justru lebih menyulitkan dibanding tarif bea masuk konvensional.

Brasil merupakan salah satu contoh negara dengan hambatan non-tarif yang kompleks. Untuk mengeksport produk pertanian, pangan, dan hasil peternakan, Indonesia diwajibkan memperoleh sertifikasi dari Kementerian Pertanian Brasil (MAPA). Persyaratan ini sering kali tidak selaras dengan standar yang sudah diakui di negara lain, seperti Uni Eropa, sehingga menyebabkan penolakan produk ekspor meskipun secara internasional sudah lolos uji kualitas. Selain itu, kewajiban pelabelan dalam bahasa Portugis menambah beban biaya dan risiko penolakan akibat kesalahan teknis pada kemasan. Di balik regulasi ini tersirat kepentingan proteksionisme bagi negara Brasil untuk melindungi produk domestiknya seperti kedelai dan gula, yang menjadi saingan ekspor Indonesia seperti minyak sawit dan gula rafinasi.

Sementara itu, India menerapkan pendekatan serupa melalui kewajiban sertifikasi dari Biro Standardisasi India (BIS) untuk produk tekstil dan pakaian, serta Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), sejenis Badan POM RI, untuk produk pangan. Proses perolehan sertifikat tersebut digambarkan oleh pelaku usaha membutuhkan waktu lama, mahal, dan minim transparansi. Tidak adanya pengakuan terhadap standar internasional atau regional seperti International Organization for Standardization (ISO) menyebabkan eksportir Indonesia harus menempuh jalur sertifikasi ulang yang panjang dan merugikan secara ekonomi.

Di sisi lain, Rusia dikenal menerapkan hambatan non-tarif yang luas dan berubah-ubah. Ketidakpastian regulasi, pengaruh kuat negara terhadap sektor perdagangan, dan sanksi ekonomi dari negara Barat turut membuat tambah rumit akses ke pasar Rusia. Bahkan di sektor energi, arus dagang dibayangi oleh risiko politik dan hukum internasional, yang membuat negara-negara mitra termasuk Indonesia harus berhitung dengan cermat sebelum melakukan ekspansi dagang.

Selanjutnya, China memberlakukan tarif dan kuota impor terhadap berbagai kategori produk, terutama sektor tekstil dan pertanian. Kebijakan ini membatasi volume impor tertentu dan menghambat masuknya produk impor. Selain itu, China juga menetapkan hambatan non-tarif seperti standar teknis ketat, kewajiban pelabelan, dan prosedur lisensi serta inspeksi yang rumit. Sertifikasi mutu yang tidak mengakui standar internasional membuat ekspor Indonesia menjadi mahal dan lambat, terutama bagi usaha kecil, dan menengah (UKM).

Terakhir, Afrika Selatan juga menerapkan tarif protektif pada sektor pertanian, otomotif, dan tekstil, serta hambatan non-tarif berupa sertifikasi mutu, inspeksi pangan, proses birokrasi yang kompleks dan tidak transparan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi UKM Indonesia yang ingin mengeksport produk-produknya ke Afrika Selatan.

## Atensi DPR

Ekonomi negara-negara BRICS menawarkan potensi besar dengan kontribusi terhadap 37,82% PDB global dan hampir separuh populasi dunia. Namun, ada hambatan non-tarif yang lebih menyulitkan dibanding tarif bea masuk konvensional bagi produk-produk Indonesia masuk ke negara-negara BRICS. Menghadapi hal ini, Indonesia harus segera menyusun pemetaan hambatan-hambatan tersebut yang mencakup inventarisasi hambatan non-tarif secara sektoral dan spesifik per negara, mendorong pengakuan sertifikasi secara timbal balik, dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami standar teknis negara tujuan. Diplomasi teknis melalui forum BRICS, World Trade Organization (WTO), atau kerja sama bilateral bisa menjadi kunci dalam membuka akses pasar. Selain itu, Indonesia juga harus mempersiapkan skenario mitigasi terhadap tekanan geopolitik dari negara-negara non-BRICS, agar strategi ekspor nasional tetap tangguh di tengah dinamika global yang tidak menentu. DPR RI melalui Komisi VI memiliki peran strategis dalam memastikan agar pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya, menjalankan langkah-langkah yang optimal dalam menghadapi kompleksitas hambatan non-tarif.

## Sumber

antaranews.com, 16 Juli 2025;

Kompas, 18 Juli 2025;

kompas.id, 17 Juli 2025.

Minggu ke-3 Juli  
(14 s.d. 20 Juli 2025)

2025



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*